

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan mengenai pidana denda di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di Jerman diatur dalam *Strafgezetsbuch*. Indonesia menganut sistem pemidanaan denda tetap dan ditentukan berdasarkan kategori-kategori yang diperjelas dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Jerman menganut sistem pemidanaan denda harian atau *day fine* yang dirumuskan dalam Pasal 40 *Strafgesetzbuch*, yaitu denda yang diberikan dengan menyesuaikan terhadap keuangan pelaku.
2. Pasal 1 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan pidana denda yang dibayarkan masuk kedalam kas negara. Sedangkan di Jerman, terdapat beberapa kondisi pembayaran denda dibayarkan kepada korban dengan skema *Schadenersatz*/ganti rugi, *Schmerzensgeld*/kompensasi atas penderitaan, dan *Täter Opfer Ausgleich* (TOA) sebagaimana yang ada dalam *German Compensation Act*. Perbedaan pengaturan tersebut berdampak pada efisiensi penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

Penelitian mengenai perbandingan hukum pidana denda Indonesia dan Jerman ditujukan agar dapat memberikan motivasi kepada para pembaca terutama mahasiswa/i Fakultas Hukum dalam menentukan topik penelitian. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca yaitu dapat:

1. Memahami dan menambah wawasannya tentang pengaturan pidana denda di Indonesia dan Jerman, dan
2. Memahami bagaimana sistem penjatuhan pidana denda baik itu di Indonesia maupun Jerman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Amran Suadi, *Filsafat Keadilan-Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana-Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- B. Areif Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, 2007.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Eko Budi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Dalam Teori dan Praktek)*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019.
- Elena kantorowicz-Reznichenko, *Day Fines: Reviving the Idea and Reserving the (Costly) Punitive Trend*, American criminal Law Review, 2017.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

- Forschungsgruppe Täter Opfer Ausgleich, *Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland Auswertung der bundesweiten Täter-Opfer-Ausgleich-Statistik für den Jahrgang 2010*, Bundesministerium der Justiz, Berlin, 2012.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum-Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Lilik Mulyadi, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan-Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Mitali Nagrecha, *The Limits of Fairer Fines : Lessons from Germany*, Criminal Justice Policy Program Harvard Law School, 2020.
- Mudzakakhir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia-Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana-Suatu Pembaharuan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2023.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Pesada Grafindo, Jakarta, 2012.
- Topo Santoso, *Hukum Pidana-Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel

- Ana Indah Cahyani dan Yulia Monita, “Pidana Denda sebagai Alternatif Pemidanaan pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 1, No. 2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9560>.

- Deddy Santoso, "Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman", *Journal of Judicial Review*, Vol. 19 No. 01, 2017, hlm. 79, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/240>.
- Dheny Wahyudi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Herry Liyus, "Prinsip Plea Bergaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 48, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/22592> .
- Dika Wicaksono, "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik *Romano-Germanic Legal Family*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/5360> .
- Muhammad Angga Fathurrahman, Pancarini, Hidayat, dan Husna, "Alternatif Pemidanaan Denda Harian (*Day Fine*) Ddalam Menghadapi *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan: Studi Perbandingan Hukum Indonesia-Jerman", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2021, <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4507>.
- Muhammad Rizki, Skripsi: *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Korea Selatan Tentang Konsep Percobaan Kejahatan*, (Jambi: Universitas Jambi), 2020.
- Nurholidah, Sahuri Lasmadi, dan Yulia Monita, "Problematisasi dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 02, No. 03, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16325>.
- Ratno Lukito, "*Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum Indonesia*", *Undang : Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/727> .
- Rico Aldiyanto Batuwaal, Olga A. Pangkrego dan Anna S. Wahongan, "Fungsi Pidana Denda dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29841> .
- Rizky Amalia, Hafrida, Elizabeth Siregar, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia", *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 02, No. 02, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13334>.
- Yohana Anggieta Sormin, Herry Liyus, dan Nys Arfa, "Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan

Bersyarat”, *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 02, No. 03, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326>.

Peraturan Perundang-Undangan

German Crime Victims Compensation Act

German Criminal Code (Strafgesetzbuch).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225.

_____, Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

_____, Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

_____, Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

_____, Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

_____, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Website

Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan 2023. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>.

How to Germany, “Pelanggaran Lalu Lintas dan Denda di Jerman”, 2023, <https://howtogermany.com/transport/traffic/traffic-violations-and-fines/>.

Law Library University of Minnesota Law School, “Germany”, <https://libguides.law.umn.edu/c.php?g=125785&p=823421>.

Pencuri Jeroan Sapi Didenda Rp 3,5 Milyar, 2018, <https://www.dw.com/id/pengadilan-jerman-denda-seorang-pencuri-jeroan-rp-35-milyar/a-42653433> .

Prison Insider Germany in 2022. <https://www.prison-insider.com/en/countryprofile/allemanne-2023?s=populations-specifiques-5d9b19c2d4a4f> .